

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanti, Vivi, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi*, Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
- Cobbe, Jennifer, 2018, *The problem isn't just Cambridge Analytica or Facebook – it's "surveillance capitalism"*, dalam www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/problem-isn-t-just-cambridge-analytica-or-even-facebook-it-s-surveillance-capitali/, diakses pada 27 Agustus 2020, Pukul 19.40.
- Darmabrata, Wahyono, 2000, *Jurnal Hukum & Pembangunan Issue No.4 vol.30: Perbandingan dan Pendidikan Hukum*, Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Hamja, 2015, *Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3: Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- HowMoneyIndonesia, *Phising (Pencurian Identitas)*, howmoneyindonesia.com/penipuan/phising-pencurian-identitas/, diakses pada 27 Agustus 2020, Pukul 19.53.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lake, Silver Editors, 2004, *Identity Theft*, Los Angeles: Silver Lake Publishing.

Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA Anggota IKAPI.

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Oka, Ngurah, *Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*, Denpasar: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

Rancangan Undang-Undang KUHP, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006/2008;

Shinta, Dewi, 2009, *Cyber Law*, Bandung: Widya Padjajaran.

Singapore Academy of Law, The Development of Criminal Law and Criminal Justice,

www.sal.org.sg/Resources-Tools/Legal-Heritage/The-Development-of-Criminal-Law-and-Criminal-Justice, diakses pada 2 September 2020, Pukul 21.18.

Soerjowinoto, Petrus dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.

Suhariyono, 2009, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4: Penentuan Sanksi Pidana dalam suatu Undang-Undang*, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Soerjono, Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama.

Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

The Singapore Computer Misuse Act (Cap. 50A);

The Singapore Cybersecurity Act 2018 (No. 9 of 2018); dan

The Singapore Personal Data Protection Act 2012;

The Singapore Personal Data Protection Regulation 2014;

The Singapore Personal Data Protection (Amendment) Bill 37 / 2020;

The Singapore Personal Data Protection (Composition of Offences) Regulation 2013;

The Singapore Spam Control Act (Cap. 311A)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

